



Kebijakan Pendidikan Di SMA Al-Hidayah Medan

Sri Mulyani ¹, Rifda Ramadina ², Said Agil Ad Darain ³, Nurul Zahara Bancin ⁴,
Ahmad Mukhlisin ⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : smuliyani30@gmail.com¹, rifdaramadina@gmail.com², Saidagil5830@gmail.com³,
zaharanurul42@gmail.com⁴

Abstract. *Education policy is a policy related to the field of education in the process of elaborating the vision and mission of education in order to achieve educational goals through strategic steps in implementing education. This research aims to describe educational policies related to the policy of using different curricula at Al-Hidayah High School in classes X, XI and class XII. However, the researchers here are more focused on discussing the independent learning curriculum. The curriculum used for class X and class XI currently uses the independent learning curriculum, for class XII uses the k13 or kurtilas curriculum. This research uses a qualitative method, descriptive research type. Data was obtained through observation, interviews and documentation techniques by focusing on data regarding the use of the independent curriculum and Al-Hidayah High School as a driving school. The results of the research are that when a school is selected to be a driving school, that school will implement an independent learning curriculum. As a driving school, all policies in learning activities use P5 (Strengthening Pancasila Student Profiles), using student-based learning. So all the provisions relating to the independent curriculum, the implementation carried out at Al-Hidayah High School is in accordance with the school culture and the condition of the existing students' character.*

Keywords: *education policy, Independent learning curriculum, driving school.*

Abstrak. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pendidikan terkait kebijakan penggunaan kurikulum yang berbeda di SMA Al-Hidayah pada kelas X, XI dan kelas XII. Namun peneliti disini lebih mengarah kepada pembahasan kurikulum merdeka belajar. Kurikulum yang digunakan untuk kelas X dan kelas XI saat ini menggunakan kurikulum merdeka belajar, untuk kelas XII menggunakan kurikulum k13 atau kurtilas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan berfokus pada data tentang penggunaan kurikulum merdeka dan SMA Al-Hidayah ini sebagai sekolah penggerak. Hasil penelitian adalah ketika sekolah terpilih menjadi sekolah penggerak, maka sekolah itu akan melaksanakan kurikulum merdeka belajar. Sebagai sekolah penggerak jadi segala kebijakan dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan P5(Penguatan Profil Pelajar Pancasila), dengan menggunakan pembelajara berbasis kepada siswa. Jadi segala ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, penerapan yang dilakukan di SMA Al-Hidayah ini sesuai dengan kebudayaan sekolah dan kondisi karakter siswa yang ada.

Kata Kunci : kebijakan pendidikan , kurikulum Merdeka belajar, sekolah penggerak.

PENDAHULUAN

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan proses non-developmental.

Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan (Tawa, 2019). Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan Fungsi Pendidikan Nasional adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada saat ini, pendidikan sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari kawasan publik. Kebijakan pemerintah bukan lagi menjadi urusan sebagian orang, namun menjadi urusan seluruh masyarakat atau kelompok tertentu. Pada masa ini, kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya menjadi urusan pemerintah, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam mengelolanya. Hal ini karena tidak semua masyarakat bisa menerima kebijakan tersebut dengan lapang dada.

Kebijakan pendidikan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Fokus pada peningkatan kualitas meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kompetensi guru, penggunaan metode pengajaran yang efektif, dan peningkatan fasilitas dan sumber daya pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMA AL-HIDAYAH yang beralamat di Yayasan Perguruan Al - Hidayah Medan, Gg. Perguruan Jl. Letda Sujono No.04, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif berupa observasi dan wawancara di SMA AL-HIDAYAH. Untuk memperoleh data yang valid maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi. Penelitian kualitatif dilakukan dalam skala kecil, kelompok yang mempunyai kekhususan, keunggulan, inovasi, maupun permasalahan dan juga Metode yang dilakukan. Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden/narasumber. Dan penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara mencari pada jurnal-jurnal dan buku-buku serta literature penelitian terdahulu yang terkait tentang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengertian kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2017). Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan (Farkhan et al., 2022).

Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan

antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan juga memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

1) Memiliki tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan Pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2) Memenuhi aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3) Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

Kebijakan pendidikan. Adapun konsep operasional dalam bidang Pendidikan yaitu:

a) Dibuat oleh orang yang berwenang.

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli dibidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

b) Dapat dievaluasi.

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan Pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.

c) Memiliki sistematika.

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, Oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya, serta daya saing produk yang berbasis sumber daya local(Irwan et al., 2021).

Tujuan Kebijakan Pendidikan

Untuk menentukan pilihan dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan, perlu pemahaman tentang pandangan terhadap tujuan kebijakan, yaitu:

- 1) Tujuan kebijakan berdasarkan tingkat masyarakat. Tujuan kebijakan disini dapat diamati dan ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Hal tersebut merupakan analisis pada fakta dan realita yang tersebar luas di masyarakat dikarenakan pendidikan dalam arti umum mencerdaskan kehidupan bangsa(Hamidah, 2020).
- 2) Tujuan kebijakan berdasarkan tingkat politisi. Tujuan kebijakan ini dapat diamati dan ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Pendidikan yang telah menjadi suatu kebijakan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif supaya tercipta generasi masyarakat dalam aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap dan perilakunya semakin demokratis(Hastuti & Soehartono, 2018).

- 3) Tujuan kebijakan berdasarkan tingkat ekonomi. Tujuan kebijakan ini dapat dilihat dan ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:
 - a) Pendidikan adalah untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi.
 - b) Investasi pendidikan memberikan nilai baik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup signifikan terutama ketika seseorang telah menggali dan mengaktualisasikan potensi diri dan mempunyai kompetensi yang cukup sesuai dengan bidangnya.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat (Ulfah, 2018). Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks. Dalam hal ini dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan intensitasnya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam evaluasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.

Dalam proses implementasi kebijakan akan terlihat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dari semua rangkaian perumusan kebijakan pendidikan, maka proses implementasi ini lah yang menjadi tahapan yang lebih rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan perlunya kerjasama yang kuat antar elemen yang ada baik dari pihak pusat maupun elemen daerah. Proses implementasi kebijakan pendidikan terdiri umumnya menggunakan empat pendekatan yaitu: 1) Pendekatan struktural. Pada hakikatnya pendekatan struktural bersifat top down. Pendekatan ini memandang bahwa perancangan, pengimplementasian dan proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktural serta sesuai dengan tingkatan maupun tahapannya, (Yuliah, 2020). Sehingga jika diamati bahwa pendekatan ini lebih bersifat birokratis dan cenderung kaku, 2) Pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manajerial lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan dibandingkan penataan struktur pelaksana. Sehingga pendekatan ini membutuhkan alat teknologi dalam proses pengimplementasian kebijakan, 3) Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang bahwa pelaksana kebijakan adalah perilaku manusia. Implementasi kebijakan pendidikan akan

terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki perilaku yang baik; 4) Pendekatan politik. Pendekatan politik lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun memperhambat penerapan kebijakan pendidikan (Hartono, 2016). Pendekatan ini cenderung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi. Keempat pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan namun sehingga memerlukan kebijaksanaan dalam menggunakannya agar kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Kurikulum Merdeka belajar

Dalam penerapan kurikulum merdeka, murid dituntut untuk menciptakan atau melaksanakan suatu proyek. Dengan aktivitas proyek tersebut, murid bisa membuat keterampilan dan potensi diri melalui aneka macam bidang (Indriyani & Jannah, 2023). Kegiatan proyek dalam kurikulum merdeka ini yaitu salah satunya menggunakan melaksanakan aktivitas P5. Kegiatan P5 adalah suatu aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 bisa dilakukan menggunakan melalui dua tahapan yaitu tahapan konseptual dan tahapan kontekstual. Dalam aktivitas P5 ini murid diberikan keleluasaan belajar menggunakan keadaan formal, struktur belajar lebih fleksibel sekolah bisa menyesuaikan pada pembagian waktu, sebagai akibatnya terjadi aktivitas belajar yang lebih aktif lantaran siswa terlibat eksklusif menggunakan lingkungan kurang lebih yang bertujuan untuk menguatkan aneka macam kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Pelaksanaan aktivitas P5 bisa menumbuhkan taraf percaya diri terhadap murid pada. bisa menaikkan potensi diri murid dan bisa mengetahui minat talenta murid dalam suatu bidang. Pada pelaksanaannya, pengajar berperan menjadi fasilitator. Kegiatan P5 bisa dikatakan menjadi penerapan pembelajaran terdiferensiasi lantaran dalam aktivitas P5 ini murid bisa menaikkan keterampilan yang dimiliki menjadi upaya menciptakan minat murid. Kegiatan P5 pula menciptakan murid sebagai lebih aktif lantaran murid melakukan diskusi menggunakan teman-temannya tentang proyek yang akan mereka tunjukkan. Tujuan P5 ini dilaksanakan menjadi upaya pada menaikkan keterampilan murid pada membuat proyek yang diadaptasi menggunakan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila adalah bagian berdasarkan kebijakan Kemdikbud dalam jenjang sekolah dasar hingga menggunakan perguruan tinggi, tujuannya untuk mewujudkan pelajar Pancasila (Armadani et al., 2023).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang baru, Nadiem Makarim, sejak menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan,

“Merdeka Belajar” atau “Kebebasan Belajar”. Konsep “Kebebasan Belajar”, yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini kemudian diterima mengingat visi misi Pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan(Sibagariang et al., 2021).

Menghadapi era revolusi industry 4.0, yang menekankan konsep merdeka belajar, setiap lembaga pendidikan diharapkan memiliki daya saing dan inovasi yang mampu berkolaborasi supaya tidak mengalami ketertinggalan. Di era revolusi 4.0, sistem pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif serta memiliki ketrampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi(Yamin & Syahrir, 2020).

Dengan perkembangan kebijakan pendidikan, tentu guru harus mampu untuk beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, sebagai tenaga profesional maka guru harus mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, yang dapat menghasilkan generasi yang terdidik, generasi yang mampu bersaing secara global dan memiliki moral yang baik (Patabang & Murniarti, 2021).

Guru harus mampu mengubah paradigma yang lama dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang baru. Dalam menghadapi era industry 4.0, guru harus mampu mengupgrade dirinya dengan mengembangkan kompetensi pedagogiknya, sehingga mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik. Guru yang memiliki kemerdekaan berpikir tentu mampu memberikan stimulus yang merangsang peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik dan memiliki daya cipta sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki.

Suasana belajar yang menyenangkan, mengingat banyak keluhan orang tua dan siswa terkait pembelajaran yang mengharuskan mencapai nilai ketuntasan minimum, apalagi selama masa pandemi. Dalam Kurikulum Merdeka tidak ada lagi tuntutan tercapainya nilai ketuntasan minimal, tetapi menekankan belajar yang berkualitas demi terwujudnya siswa berkualitas, berkarakter profil pelajar Pancasila, memiliki kompetensi sebagai sumber daya manusia Indonesia.

Sekolah Penggerak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021). Dalam arahannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menginisiasi Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.

Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain (Kemendikbud, 2021: 6)

Profil pelajar Pancasila merupakan bagian dari transformasi pendidikan karakter yang harus dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Ada dua hal yang mendasar untuk mewujudkan keterlaksanaan suatu program di sekolah (baik itu program jangka pendek, program jangka menengah, maupun program jangka panjang), yaitu prilaku kepemimpinan kepala sekolah dan prilaku guru yang ada pada sekolah itu sendiri. Prilaku kepemimpinan kepala sekolah sebagai motor penggerak utama di sekolah, sedangkan prilaku guru merupakan pendukung utama yang sangat integral dan tak mungkin dapat dipisahkan dengan keberhasilan pelaksanaan program yang tertuang dalam visi dan misi sekolah (Faiz & Faridah, 2022).

Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat

meluas dan terlembaga (Khofifah & Syaifudin, 2023).

Hasil

Kebijakan Penggunaan Kurikulum Di SMA Al-Hidayah Medan

Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal harus disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut (Fuad Ihsan, 2010). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bahwa terkait kebijakan penggunaan kurikulum di SMA Al-Hidayah untuk kelas X dan kelas XI saat ini menggunakan kurikulum merdeka belajar, sedangkan untuk kelas XII masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurtilas. Jadi kelas X dan kelas XI sudah hampir dua tahun menggunakan kurikulum merdeka belajar.

Sekolah Penggerak

Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep transformasi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan mampu menemukan solusi dan memperbaiki segala permasalahan secara mandiri. Sekolah Penggerak diharapkan dapat melakukan perubahan secara terus menerus dan bertransformasi menjadi sekolah yang mencetak Profil Pelajar Pancasila (Zamjani dkk, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bahwa SMA Al-Hidayah salah satu sekolah yang dinyatakan sebagai sekolah penggerak. Jadi segala kebijakan dari sekolah penggerak misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan P5, dengan menggunakan pembelajaran berbasis kepada siswa. Untuk penerapan di sekolah ini yang berhubungan dengan kurikulum merdeka belajar sesuai dengan kebudayaan sekolah atau kondisi karakter siswa di SMA Al-Hidayah.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pengimplementasian Kebijakan Pendidikan Di SMA Al Hidayah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah faktor pendukung dalam kebijakan yaitu karena SMA Al-Hidayah terpilih dari prestasi kepala sekolah menjadi sekolah penggerak dan didukung oleh beberapa guru pendukung yang memang mendukung kegiatan-kegiatan sekolah, karena ada 5 guru pendamping. Untuk faktor penghambat nya itu kembali ke siswa SMA Al-Hidayah dengan kondisi yang pertama, masuk siang jadi terkendala beberapa hal dalam hal pelaksanaan pembelajarannya kemudian yang kedua, terganggu dengan kegiatan background pendidikan orang tua dari sianak terkadang tidak mendukung

dengan program-program atau kebijakan sekolah yang memang sudah di susun dengan rapi jadi ada istilah pro kontra dan yang ketiga, masalah biaya.

Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kebijakan Penggunaan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah kelebihan dari penggunaan kurikulum merdeka membuat guru lebih kreatif lagi dan inovatif mencari bagaimana strategi belajar mengajar supaya lebih mengikuti kemauan peserta didik agar mereka tidak ketinggalan pembelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi guru harus lebih update dan lebih aktif jadi salah satu kelebihan juga jadi menambah wawasan guru ini kemudian karena ada beberapa guru disini juga sering pelatihan-pelatihan jadi kami bisa membawa bahan materi yang bisa kami terapkan sama sekolah dan berefek sama siswa yang punya masalah. Kalau kekurangannya itu masih ada beberapa guru yang memang belum siap dengan kurikulum merdeka ini karena kurikulum terbaru dan ada juga beberapa siswa yang masih kekurangan dana karena kurikulum merdeka ini harus butuh biaya karena kurikulum ini lebih ke arah praktek. Selain itu juga kesiapan mental dari siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan penggunaan kurikulum yang ada di SMA Al-Hidayah untuk kelas X dan kelas XI menggunakan kurikulum merdeka belajar, untuk kelas XII menggunakan kurikulum 2013 atau kurtilas. Namun untuk kebijakan sekolah dalam pembagian tugas disaat kurikulum merdeka dan sesuai dengan peraturan, bahwa dikelas X itu tidak ada pembagian jurusan tetapi di kelas XI kita arahkan peminatan lebih ke arah IPA atau IPS.

SMA Al-Hidayah salah satu sekolah yang dinyatakan sebagai sekolah penggerak. Jadi segala kebijakan dari sekolah penggerak misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan P5, dengan menggunakan pembelajara berbasis kepada siswa. Faktor pendukung dalam kebijakan kurikulum merdeka yaitu sekolah terpilih dari prestasi kepala sekolah menjadi sekolah penggerak dan untuk faktor penghambat nya itu kembali ke siswa disini dengan kondisi yang pertama, masuk siang. Yang kedua, terganggu dengan kegiatan background pendidikan orang tua dari sianak. Yang ketiga, masalah biaya.

Kelebihan dari kebijakan kurikulum merdeka belajar guru harus lebih update dan lebih aktif jadi salah satu kelebihan juga jadi menambah wawasan guru. Sedangkan kekurangannya masih ada beberapa guru yang memang belum siap dengan kurikulum ini, karena kurikulum terbaru dan beberapa siswa yang masih kekurangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Armadani, P., Kartika Sari, P., Abdullah, F. A., & Setiawan, M. (2023). Analysis of the Implementation of Merdeka Belajar Curriculum in Students of SMA Negeri 1 Junjung Sirih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari, 2023*(1), 341–347. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7527654>.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16*(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Faiz, A., & Faridah, F. (2022). Program Guru Penggerak Sebagai Sumber Belajar. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 14*(1), 82–88. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v14i1.1876>
- Fuad Ihsan. (2010). Dasar Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, 9*(1), 34–44.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 6*(01), 35-45.
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence, 8*(1), 34–41. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Irwan, I., Ichsan, F. N., Gistituati, N., & Marsidin, S. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Pada Masa Darurat Covid 19. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 9*(2), 89–95. <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i2.4238>
- Indriyani, I., & Jannah, R. (2023). Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Prospek, 2*(2), 98–103. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/prospek/article/view/2624>
- Khofifah, B., & Syaifudin, M. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Sekolah Penggerak. *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian), 3*(8), 7405–7410.
- Patabang, A., & Murniarti, E. (2021). Analisis Kompetensi Pedagogik Guru pada Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3*(4), 1418–1427. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.584>
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4*(3), 511-518
- Suyahman, S.(2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6*(2), 1047-1054.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., & Indonesia, U. K. (2021). *PERAN GURU PENGGERAK DALAM PENDIDIKAN. 14*(2), 88–99.

- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>
- Ulfah, U. (2018). *Peran Trait Mindfulness Terhadap Regulasi Emosi Pada Remaja Panti Asuhan Serta Tinjauan Dalam Islam*. 4, 9.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1121>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 16-40.
- Zamjani, dkk. (2020). Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak. Diakses pada 9 November 2023, dari <https://penggerak-simpkb.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/portalprogramsekolahpenggerak/wpcontent/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf>